

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Myanmar yang terkenal sebagai negeri seribu pagoda kembali membuat catatan buruk. Dalam beberapa waktu ini muncul kembali berita yang mencengangkan dari Myanmar. Setelah terjadi aksi demonstrasi berdarah tahun 1988 yang menewaskan 3.000 demonstran dan kini hal yang hampir serupa terjadi di bulan September 2007. Publik internasional kini dikejutkan dengan tewasnya sekitar 13 demonstran termasuk wartawan kantor berita APF *News* Jepang Kenji Nagai akhir September 2007. Yang lebih mengejutkan lagi demonstrasi ini dipimpin oleh biksu yang nota bene merupakan orang yang dihormati oleh masyarakat Myanmar dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis di Myanmar. Namun, tidak demikian halnya dengan junta. Bagi junta, biksu, rakyat sipil atau siapa saja yang membangkang merupakan musuh.

Catatan pelanggaran HAM junta terhadap rakyat Myanmar bukan hanya terjadi kali ini saja. Namun, berbagai tindakan represif pemerintah telah menjadi bagian kehidupan rakyat Myanmar selama puluhan tahun. Sejak junta berkuasa, semua sendi kehidupan rakyat Myanmar berada di bawah bayang-bayang junta. Rakyat dipaksa untuk kerja paksa atau bahkan melakukan tanam paksa. Tidak ada kebebasan untuk rakyat. Setiap gerak-gerik rakyat selalu dimata-matai junta.

... ..

juga menerapkan tahanan rumah untuk Daw Aung San Suu Kyi, pemimpin prodemokrasi.

Di saat PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan Amerika Serikat berupaya untuk menghentikan kekejaman junta terhadap demonstran, RRC telah menyatakan sikap tidak akan melakukan intervensi dalam masalah domestik Myanmar. Penolakan RRC dalam masalah Myanmar tidak hanya terjadi dalam aksi demonstrasi kali ini saja, draft yang dikeluarkan oleh PBB tentang Myanmar juga sering dimentahkan oleh RRC. Sikap RRC yang demikian telah menarik perhatian penulis. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil judul **“POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CINA TERHADAP MYANMAR (STUDI KASUS: PENEGAKAN DEMOKRASI DAN HAM DI MYANMAR)**. Sejauh ini RRC berhasil membujuk junta untuk menerima kedatangan wakil PBB Ibrahim Gambari.

B. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk mengetahui alasan mengapa RRC mendukung pemerintahan Junta Militer Myanmar.
- 2) Mengkaji kebijakan politik luar negeri RRC terhadap Myanmar.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana kondisi kehidupan demokrasi di Myanmar

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Setelah Perang Dingin (*Cold War*) berakhir, RRC menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam dinamika hubungan internasional. Karena RRC masih bersikukuh tetap mempertahankan ideologi komunis dan sistem partai tunggal, sementara di Uni Soviet dan Eropa Timur, ideologi komunis telah ditumbangkan oleh pemerintahan demokratis dan mengadopsi sistem multi partai. Karena menjalankan ideologi komunis inilah untuk beberapa waktu hubungan RRC dengan negara lain membeku. Terutama karena RRC dianggap telah memberi bantuan kepada gerakan komunis di sejumlah negara, misalnya negara-negara ASEAN.

Hal inilah yang mengakibatkan hubungan antara RRC dan ASEAN pada awalnya lebih banyak diwarnai dengan kecurigaan. RRC menganggap kehadiran ASEAN dalam politik regional dalam dekade 1960-an sebagai bentuk lain dari ancaman Barat terhadap RRC. Sebagian anggota ASEAN memang merupakan anggota dari organisasi keamanan regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Inggris (*Collective Defence Treaty, SEATO, Five Power Defence Arrangement*). Sementara itu, negara-negara ASEAN juga mencurigai RRC sebagai induk dari gerakan komunis di Asia Tenggara.¹

Kebijakan RRC terhadap Asia Tenggara bersumber pada sikap Tiongkok Tradisional terhadap apa yang dikenal sebagai *Nanyang* (*Southern Seas/Lautan Selatan*) dan pengalaman historisnya dalam abad ke - 20 dimana Tiongkok merasa terancam tiga kali dari selatan melalui Asia Tenggara. Ancaman pertama

datang dari militetrisme-fasisme Jepang dalam PD-II. Ancaman kedua datang dari AS selama Perang Dingin di Asia Pasifik (1950-1972). Ancaman ketiga datang dari Uni Soviet yang berlangsung selama dasawarsa 1970-an sampai 1980-an.

Pada awal akhir Perang Dingin, terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana seharusnya sikap politik luar negeri RRC di Asia Tenggara, terutama kaitannya dengan tata hubungan internasional yang baru. Ada dua pendapat dikalangan elit politik RRC mengenai posisi Asia Tenggara. Pertama, RRC harus mengurangi keterlibatan terhadap konflik-konflik Asia Tenggara, dengan pertimbangan dukungan RRC terhadap Khemer Merah pada era Perang Dingin karena telah merusak citra internasional RRC dan mengganggu stabilitas kepentingan nasional. Kedua, RRC seharusnya memainkan peran penting dalam ekonomi, politik dan militer di Asia Tenggara. Ada beberapa pertimbangan yang membuat RRC akhirnya intens melakukan pendekatan dengan Asia Tenggara. Pertama, RRC tampaknya masih menyimpan kecurigaan terhadap Jepang dan perkembangan positif dalam hubungan ASEAN-Jepang-Indocina. Kedua, RRC memiliki keinginan untuk memperluas pengaruhnya sebagai *world power*, melalui instrumen politik luar negeri dan militernya.²

Titik awal perubahan hubungan RRC-ASEAN dimulai setelah RRC melakukan reformasi ekonomi dibawah kepemimpinan Deng Xioping. Sejak akhir dekade 1970-an Deng Xioping membuat RRC mulai terbuka dengan dunia luar dan mulai membuka investasinya bagi investor asing. Sejak akhir dekade 1970-an RRC mulai mendekati ASEAN dengan mengurangi dukungan terhadap gerakan

komunis di negara-negara ASEAN. Upaya pertama dilakukan dengan dengan menutup Radio Rakyat Thailand di Propinsi Yunnan tahun 1979. Kebijakan ini mengurangi pengaruh RRC terhadap gerakan komunis Thailand.³

Kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Thailand tahun 1988 menandai babak baru hubungan RRC-ASEAN. Dalam kunjungan ini Li Peng menjelaskan kebijakan dasar RRC terhadap ASEAN yang berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan hubungan RRC-ASEAN. Tahun berikutnya RRC secara resmi membubarkan Partai Komunis Malaysia dan Partai Komunis Thailand di sebuah wilayah di Thailand.⁴ Selanjutnya, RRC juga menghentikan bantuan terhadap gerakan komunis di Myanmar pada tahun 1989 yang pada saat itu belum menjadi anggota ASEAN. RRC juga tercatat sebagai negara pertama yang memberi bantuan terhadap Myanmar setelah Myanmar mendapat sanksi ekonomi dari AS dan Inggris.

Pertengahan tahun 1988 pemerintahan junta menerima bantuan dari RRC sekitar US\$ 1,4 milyar dalam bentuk tank, pesawat tempur, artileri dan berbagai jenis senjata yang lain. Dari bantuan tersebut RRC mendapat imbalan dengan mendapat akses untuk membangun fasilitas yang dapat memonitor angkatan laut dan angkatan darat India di Pulau Great Coco di Teluk Benggala. Selain itu pemerintah junta juga memberikan konsesi-konsesi dan eksplorasi SDA di

Myanmar merupakan negara yang dikuasai oleh rezim militer dan saat ini dipimpin oleh Jenderal Than Shwe. Rezim militer Myanmar dikenal sebagai rezim yang paling tertutup di dunia. Dalam sejarah perjalanan sistem pemerintahan Myanmar, kekuatan militer telah mengakar sebagai bagian usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Kemerdekaan Myanmar tidak terlepas dari peran AFPFL (*Anti Facist People Freedom League*) pimpinan Aung San, ayah dari Daw Aung San Suu Kyi. AFPFL dibentuk pada tahun 1944. Perjuangan AFPFL membuahkan hasil dengan adanya kemerdekaan Myanmar tanggal 4 Januari 1948 dengan U Nu sebagai Perdana Menteri pertama Myanmar. Dari AFPFL inilah angkatan bersenjata Myanmar dibentuk. Namun, angkatan bersenjata ketika itu tidak ikut campur dalam politik pemerintahan Myanmar.

Ketika terjadi situasi genting di Myanmar PM U Nu menunjuk Kastaf Angkatan Bersenjata Jenderal U Ne Win sebagai pelaksana sementara Perdana Menteri Myanmar tahun 1958-1960.⁵ Melalui pelimpahan kekuasaan dari PM U Nu kepada Jenderal Ne Win menyebabkan jenderal angkatan bersenjata tersebut menggunakannya sebagai alat pembenaran untuk menggulingkan pemerintahan PM U Nu pada tahun 1962. Pada dekade itulah junta militer memulai babak baru dalam pemerintahan Myanmar dibawah Ne Win. Sampai saat ini junta tercatat telah memimpin Myanmar selama 45 tahun meskipun pada tahun 1990 Partai *National League Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan pemilu.

⁵ *“Myanmar: Dilema Demokrasi dan Bangsa”* 20 Oktober 2007

Sejak Ne Win berkuasa di Myanmar, dia melakukan berbagai macam perubahan signifikan. Ne Win membubarkan semua parpol dan hanya ada satu partai yang diakui, Partai Program Sosialis Burma (*Burma Socialist Program Party/BSPP*). Tidak hanya dalam hal politik junta berkuasa. Junta juga tampil dalam penguasaan atas sektor ekonomi. Penguasaan atas akses dan aspek ekonomi diawali dengan mengambil alih pengelolaan aset-aset eks-kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung dan beragam industri.

Era keemasan Junta Myanmar muncul tatkala Ne Win menerapkan Sosialisme Gaya Burma. Hakeketnya, Sosialisme Gaya Burma ini merupakan kecondongan paham politik Ne Win yang diadopsi dari sosialisme RRC. Pada saat itu militer melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Sedangkan pengelolaannya dibawah kendali junta. Tidak hanya itu saja, pemerintahan junta militer Myanmar juga mengusir warga Cina dan India yang saat itu menguasai ekonomi Myanmar. Program nasionalisasi itu sangat merugikan pengusaha asing karena modal investasi mereka tidak dikembalikan.

Selama Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) berkuasa terjadi berbagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan junta. Hampir semua kehidupan sosial, politik, dan ekonomi rakyat Myanmar dikuasai oleh junta. Sehingga bisa dikatakan bahwa sendi-sendi kehidupan sebagian besar rakyat Myanmar jauh dari pemerintahan yang demokratis. Junta membatasi aktivitas rakyat dalam mengeluarkan pendapat. Begitu pula dengan pembatasan media massa oleh junta. Akibatnya akses untuk mendapatkan berita mengenai Myanmar sangat sulit untuk

Pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh junta juga terkait dalam hal kesejahteraan rakyat Myanmar. Terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok antara rakyat pribumi dengan petinggi militer beserta bawahannya. Bila rakyat harus merasakan kemiskinan tidak demikian halnya dengan anggota militer. Anggota militer menerima berbagai fasilitas perumahan, makanan, dan kesehatan yang jauh lebih baik dari rakyat.

Pada tahun 1984 junta menduduki negara bagian Karen yang merupakan kawasan otonom di sebelah timur Myanmar.⁶ Suku Karen mengalami berbagai penindasan yang dilakukan oleh junta seperti kerja paksa, pembunuhan, perusakan ladang, hingga pemerkosaan. Berbagai tindakan intimidasi junta menyebabkan rakyat Myanmar mengungsi di daerah perbatasan, seperti di wilayah perbatasan Myanmar-Bangladesh ataupun Myanmar-Thailand. Meskipun mereka harus tinggal di kamp-kamp pengungsi yang tidak layak huni, namun setidaknya mereka mendapatkan kebebasan dan jauh dari rasa takut.

Dekade tahun 1988 terjadi pencopotan jabatan dari Ne Win. Pemerintahan ini kemudian diserahkan kepada Jenderal U Sein Lwin. Kegagalan Sein Lwin menyebabkan pergantian kekuasaan kepada pihak sipil yakni Dr. Maung-Maung. Militer kembali mengambil alih kekuasaan setelah Jenderal Saw Maung mengambil alih kekuasaan 18 September 1988. Saw Maung juga membentuk SLORC (*the State Law and Order Restoration Council*). SLORC ini merupakan pergantian kulit dari militer. Pada saat dekade ini pulalah terjadi liberalisasi

⁶ <https://www.researchgate.net/publication/301442307>

perdagangan dan penghapusan sistem ekonomi komando setelah terjadi keterpurukan ekonomi.

Akibat keterpurukan ekonomi yang terjadi inilah memicu aksi demonstrasi. Demonstrasi pada tanggal 18 Agustus 1988 yang digerakkan oleh mahasiswa telah menelan korban 3.000 demonstran. Militer melakukan berbagai operasi militer untuk menumpas aksi demonstrasi tersebut. Berbagai kecaman datang dari masyarakat internasional untuk menghentikan segala tindakan junta yang represif. Kecaman-kecaman dari masyarakat internasional menyebabkan Myanmar mengambil sikap untuk menutup diri dari hubungan luar. Junta Myanmar telah mendapat sanksi ekonomi pihak Barat serta tidak mendengarkan seruan dari negara tetangga Asia Tenggara dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Kecaman internasional membuat pemerintahan junta menutup diri dari pihak asing. Segala sesuatu yang berasal dari luar dibatasi oleh pemerintah. Kalangan pers, pengacara, dan kaum intelektual yang belajar di luar negeri dibatasi bahkan dilarang untuk menunjukkan aktivitasnya di luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang serupa terhadap media asing. Arus informasi dari asing juga dibatasi. Hal ini sebagai proteksi pemerintah terhadap masuknya informasi luar ke dalam Myanmar. Akibatnya selama dekade tahun 1989 dan awal 1990 laporan-laporan mengenai Myanmar sangat sulit diperoleh.

Ketika dunia internasional mengecam tindakan junta yang represif, RRC memberikan bantuan terhadap Myanmar. Tercatat pada tahun 1988 RRC memberikan bantuan terhadap Myanmar yang memberikan bantuan terhadap pemerintahan

junta. Beberapa pakar Barat menganggap bahwa RRC dengan tangkas telah mengisi kekosongan diplomatik setelah sebelumnya Myanmar mendapat sanksi dan embargo ekonomi dari AS dan Inggris.

Berbagai perusahaan eksplorasi multinasional seperti Chevron, perusahaan raksasa AS, perusahaan Total asal Perancis dan *China National Petroleum Corporation* memberikan banyak keuntungan untuk pemerintahan junta. Akan tetapi keuntungan dan pajak dari eksplorasi perusahaan multinasional tidak pernah dinikmati rakyat. Hanya para petinggi militer dan bawahannya yang menikmati kesejahteraan. Para investor asing termasuk investor Cina seperti menutup mata melihat kemiskinan rakyat Myanmar.

Kejenuhan rakyat Myanmar yang hidup miskin dibawah rezim militer selama puluhan tahun telah menyebabkan aksi demonstrasi tahun 2007. Demonstrasi kali ini berawal dari kebijakan Pemerintah Junta Militer Myanmar yang menaikkan harga solar 500 persen tanggal 15 Agustus lalu. Kenaikan sebesar 500 persen ini tentu sangat menyulitkan rakyat Myanmar yang miskin.⁷ Kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebesar 500% ini terbilang sangat berani. Di sisi lain kebijakan ini sebagai langkah junta untuk mengurangi defisit negara. Kenaikan harga BBM secara tiba-tiba ini sangat memukul rakyat yang sudah sengsara dan miskin.

Semula aksi demonstrasi yang dimulai pada bulan Agustus 2007 ini berjalan secara damai. Namun, demonstrasi ini berubah menjadi tragedi berdarah. Demonstrasi ini diikuti 100.000 orang dan 20.000 orang diantaranya merupakan

⁷ <http://www.kompas.com>, 15 Agustus 2007

biksu. Tanggal 26 September 2007 militer memukul, melontarkan gas air mata, dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan biksu dan warga sipil di Yangon. Dalam peristiwa ini setidaknya 4 orang termasuk 3 biksu tewas dan 100 orang cidera. Sejak junta bertindak keras kepada demonstran dalam tiga hari terakhir, setidaknya 13 orang tewas dalam peristiwa tersebut termasuk seorang wartawan kantor berita APF News Jepang Kenji Nagai. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadi aksi berdarah seperti yang terjadi pada tahun 1988 yang menewaskan 3.000 demonstran.⁸

Pemerintah Myanmar mengalokasikan 40% anggarannya untuk militer yang hanya berjumlah 450.000 personil. Sedangkan jumlah penduduk Myanmar sekitar 56 juta jiwa. Militer mendapatkan alokasi keuangan sekitar 120 kyat (mata uang Myanmar) sedangkan rakyat hanya menerima 1 kyat. Dengan perbandingan ini sekitar 90% rakyat Myanmar hidup dalam kemiskinan.⁹

Tindakan junta yang sangat represif terhadap demonstran kembali menuai kecaman internasional, termasuk para menteri luar negeri ASEAN. Mereka menyatakan seharusnya pemerintah Myanmar agar bisa menahan diri dan mengupayakan segera penyelesaian politik terhadap demonstrasi. Kecaman internasional tak ada yang didengar junta.

Kini harapan dan tekanan ditujukan kepada RRC agar pemimpin junta Jenderal Than Shwe tunduk. RRC diminta melakukan berbagai upaya untuk menahan junta agar menghentikan tindak kekerasan. Diplomat Asia dan Barat di Beijing dan Asia Tenggara menyatakan pengaruh RRC terhadap Myanmar tidak

⁸ *Kompas*, "Junta Tembaki Pemrotes", 27 September 2007.

⁹ *Kompas*, "Senyum Para Jenderal Tangisan Para Rakyat", 27 September 2007.

ada duanya dan dapat membuat keputusan yang dapat menghindarkan junta dari konfrontasi kekerasan yang lebih rumit dengan para pengunjung rasa. Asisten Menlu AS Christopher Hill mengatakan bahwa RRC harus menggunakan pengaruhnya terhadap Myanmar untuk menghentikan tindakan keras militer. Sedangkan utusan RRC di PBB Wang Guangya mengatakan bahwa pemberian sanksi-sanksi terhadap Myanmar tidak akan banyak membantu.¹⁰

RRC sebagai negara tetangga Myanmar memang merasa risau dengan situasi genting di Myanmar. RRC mengharapkan semua pihak bisa menahan diri dan menangani masalah ini secara tepat agar tidak semakin luas yang nantinya akan berdampak pada stabilitas Myanmar serta perdamaian dan stabilitas regional. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, RRC sampai saat ini belum bersedia mendukung penjatuhan sanksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bahkan draft yang dikeluarkan oleh DK PBB atas pengaruh RRC lebih diperlunak lagi. Sikap RRC yang lunak terhadap junta juga terjadi saat DK PBB mengeluarkan draft Januari 2007. Sehingga sikap RRC yang demikian terhadap Myanmar menimbulkan spekulasi bagi diplomat dan para pakar. Mereka memperhatikan bahwa para pemimpin komunis RRC mungkin tidak ingin menekan lebih keras. Junta Myanmar telah bertahan terhadap sanksi ekonomi pihak Barat serta seruan dari negara tetangga Asia Tenggara dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

D. POKOK PERMASALAHAN

Setelah berakhirnya Perang Dingin, RRC kembali meninjau hubungan diplomatiknya dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Myanmar. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar dan pemerintahan yang tidak demokratis menyebabkan dunia internasional menyerukan penegakan HAM dan demokrasi di Myanmar. Akan tetapi, RRC menutup mata atas pemerintahan Myanmar yang tidak demokratis dan terjadinya berbagai pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM pada aksi demonstrasi September 2007. Sehingga pokok permasalahannya adalah:

Mengapa RRC kurang mendukung penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar?

E. KERANGKA TEORI

Sikap Pemerintah RRC yang kurang mendukung adanya penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Pembuatan Keputusan (*Decision Making Theory*) Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional dan Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton.

Teori atau model ini mendasarkan pada gagasan adanya rasionalitas komprehensif dari perilaku ideal, artinya mencari pilihan alternatif yang paling ideal. Dengan kata lain memutuskan suatu kebijakan yang paling optimum dalam artian pada hubungan sarana dan tujuannya.¹¹ Dalam pengertian ini semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah RRC terkait dengan sikapnya yang

kurang mendukung penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar akan bersifat rasional. Sebab, dalam usahanya untuk mencapai kepentingan nasional RRC, RRC tetap mempertahankan *status quo* di Myanmar tanpa memperhatikan tekanan dunia internasional.

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ketiga model tersebut adalah model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratik. Pada permasalahan ini penulis menggunakan model I, yaitu Aktor Rasional untuk menganalisa permasalahan ini.

Dalam model I, yakni Aktor Rasional, proses pembuatan keputusan dipandang sebagai akibat tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Proses pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual. Politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional.¹² Pemilihan model Aktor Rasional ini relevan untuk menganalisa kebijakan RRC menghadapi situasi di Myanmar. Dalam model ini dijelaskan bahwa pengambilan keputusan ini dibuat oleh suatu pemerintahan yang monolit. Pemerintahan monolit dalam kasus RRC yang dimaksud adalah pemerintahan RRC yang dikuasai oleh Partai Komunis Cina. Dalam pemerintahan RRC segala kebijakan negara dibuat oleh PKC tanpa ada pihak yang bisa menggagalkan keputusan yang yang dibuat oleh PKC. Sebab, Sekjen PKC dijabat oleh presiden atau perdana menteri.

¹² Graham T. Allison, *Essays in International Strategy*, (New York: W.W. Norton, 1971), hal. 12.

Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang berakar dan terkoordinasi. Dalam model ini digambarkan bahwa pembuat keputusan dalam melakukan alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan ini digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Model ini sering diterapkan untuk mendeskripsikan politik luar negeri.¹³

Unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelahaan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif itu.¹⁴

Penelahaan kepentingan nasional RRC dapat dicermati melalui dukungan pemerintah RRC terhadap junta. Bagi RRC tidak ada negara di Asia Tenggara yang tidak penting. Termasuk keberadaan Myanmar yang dianggap sebagai *buffer state* antara wilayah India-RRC. Konsep kepentingan nasional akan penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan ini.

Kepentingan nasional yang terkait dengan politik luar negeri dideskripsikan sebagai berikut oleh Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit

¹³ Ibid. internasional ketahanan menghadapi kepentingan nasional

(Foreign Policy as a strategy or planned course of action developed by decision makers of a state vis a vis other or international entities aimed at achieving specific goals in term of national interest)¹⁵

Menurut Hans J Morgenthau, secara empiris kekuatan atau politik suatu negara tertentu, dapat dimaksudkan hanya kekuatan atau politik luar negeri sekelompok individu tertentu yang termasuk dalam negara yang sama. Suatu negara menjalankan politik luar negerinya sebagai organisasi legal yang disebut negara, dengan segala badan yang bertindak sebagai wakil negara dalam urusan internasional. Mereka berbicara atas nama negara, merundingkan perjanjian atas nama negara, merumuskan tujuan, memilih cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan berusaha meningkatkan dan menunjukkan kekuatannya.¹⁶

Perwujudan dari kepentingan nasional melalui politik luar negeri dapat dicapai dengan memperhatikan kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton elemen-elemen kepentingan nasional tersebut adalah: kelangsungan hidup (*self preservation*), kemandirian hidup (*independence*), integritas territorial (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

Menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang dikejar negara untuk memaksimalkan apa yang terbaik untuk negaranya secara mandiri.¹⁷ Kepentingan nasional berkaitan dengan geopolitik, kemampuan militer dan keadaan ekonomi. Geopolitik merupakan hubungan antara geografi dan politik dan konsekuensi-konsekuensinya untuk

¹⁵ Jack C. Plano and Roy Olton, *The international Dictionary*, terjemahan Wawan Juanda, Third Edition, Clio Press Ltd, Holt, 1982, hal 127.

¹⁶ Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 158.

¹⁷ Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trends and Transformation. Tenth*

negara dalam kepentingan nasional. Kemampuan militer akan mendukung bagaimana negara-negara mencapai tujuan-tujuannya. Ketika semua negara ingin memperoleh tujuan yang sama, untuk merealisasikan tujuan suatu negara akan bervariasi mengikuti kemampuan militer negara tersebut.¹⁸ Keadaan ekonomi dipengaruhi oleh level ekonomi dan pembangunan industri suatu negara yang akan mempengaruhi tujuan politik luar negeri. Kemampuan militer juga berperan dalam kapabilitas ekonomi.¹⁹

Sikap RRC yang kurang mendukung penegakan HAM dan demokrasi di Myanmar dapat ditelaah dengan memperhatikan untung rugi. Secara geopolitik RRC tidak akan membiarkan demokrasi hidup di Myanmar. Myanmar dikelilingi negara-negara sosialis seperti Rusia dan RRC. Letak Myanmar yang bertetangga langsung dengan RRC secara politis dapat mempengaruhi RRC. Bagi RRC, jika demokrasi hidup di Myanmar maka Myanmar akan berada di bawah pengaruh Barat. Kondisi ini yang tidak pernah diharapkan terjadi di Myanmar karena dapat mengancam kepentingan nasional RRC di Myanmar.

Pertumbuhan ekonomi RRC selama kurun waktu 1985-2005, sangat mengesankan. Pertumbuhan ekonomi yang besar ini dibuktikan dengan produk domestik bruto (PDB) dengan angka rata-rata 9,8%. Pada tahun 2025 kekuatan ekonomi RRC diprediksikan akan ditunjang oleh kekuatan pertahanan yang tangguh.²⁰ Pada tahun 2007 RRC telah mengalokasikan dana untuk militer sekitar 45 milyar dolar AS.²¹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 62.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 63.

²⁰ *Kompas*, "Kebangkitan China dan Asia Tenggara", 21 April 2005.

²¹ *Kompas*, "China Mengalokasikan Dana untuk Militer Sekitar 45 Milyar Dolar AS", 21 April 2007.

Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan didukung dengan pertahanan militer yang kuat merupakan kekuatan RRC untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui Myanmar. Pemerintah RRC melihat bahwa kekayaan SDA Myanmar dapat menyuplai pasokan energi untuk mendukung perwujudan kepentingan nasionalnya yang dititikberatkan pada sektor ekonomi. Pemerintah RRC telah melakukan berbagai investasi milyaran dolar di Myanmar, misalnya dengan melakukan investasi hutan kayu, lapangan gas dan mineral. Myanmar juga terikat kontrak 20 tahun dengan RRC untuk pengadaan gas alam.²² Pemerintah RRC juga melakukan pengembangan pelabuhan Kyauk Phyu, Myanmar. Pelabuhan ini sangat strategis bagi RRC karena sangat dekat dengan wilayah daratan RRC. Kyauk Phyu sebagai jalan darat pasokan minyak yang berhubungan dengan Kunming, RRC.²³

Bagi RRC kekuatan militer memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dari hubungan kerja sama yang dilakukan antara RRC dan pemerintah Junta Militer Myanmar, RRC memperoleh akses fasilitas laut di Dawei, Myanmar. Kerjasama-kerjasama seperti ini telah membuka kesempatan bagi RRC mengontrol jalur laut perdagangan internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi RRC. Selain itu, RRC melakukan berbagai kegiatan monitoring angkatan laut dan angkatan darat India di Pulau Great Coco di Teluk Benggala. RRC juga mendapatkan akses untuk fasilitas-fasilitas intelijen di Laut Andaman. Tidak hanya itu saja, dukungan RRC terhadap Myanmar dengan

²² www.aljazeera.com, diakses tanggal 30 September 2007.

²³ www.aljazeera.com, diakses tanggal 30 September 2007.

bantuan dana (termasuk persenjataan) ditujukan untuk pos-pos Angkatan Laut RRC di sekitar Teluk Benggala.²⁴

F. HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teori di atas, maka hipotesis yang dapat diperoleh yaitu alasan RRC kurang mendukung penegakan demokrasi dan HAM di Myanmar disebabkan oleh:

- Kepentingan nasional RRC pada bidang ekonomi, yaitu dalam bidang investasi maupun eksplorasi SDA.
- Kepentingan nasional RRC pada bidang keamanan militer.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Batas waktu permasalahan yang menjadi perhatian penulis yaitu dimulai pada tahun 1988-2007. Namun, dalam beberapa bagian penulisan ini tidak menutup kemungkinan untuk mengulas berbagai peristiwa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hampir dalam waktu yang bersamaan di RRC (1989) dan Myanmar (1988) terjadi aksi demonstrasi yang menginginkan penegakan demokrasi. Pada tahun 1988 ini mulai juga dibuka hubungan dengan RRC. Hubungan kerja sama antara RRC dan Myanmar meliputi aspek perdagangan, eksplorasi minyak, perdagangan senjata, dan pembangunan jalan. Lebih lanjut hubungan antara RRC dan Myanmar melangkah dalam hal politik, ideologi, dan diplomatik. Sedangkan di tahun 2007 ini hubungan antara RRC dan Myanmar

dipertaruhkan dengan adanya demonstrasi berdarah yang menuntut RRC untuk bersikap keras terhadap junta.

H. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku-buku literature, jurnal, majalah, koran, dan bacaan-bacaan penunjang lainnya

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I berisi mengenai gambaran penulisan yaitu: Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Teori, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Jangkauan Penelitian.

Bab II akan mendeskripsikan tentang bagaimana sistem politik domestik dan dasar-dasar politik luar negeri RRC, sistem ekonomi dan sistem pertahanan RRC. Sistem politik domestik ini akan menjelaskan peran PKC (Partai Komunis Cina) sebagai pembuat keputusan utama di RRC, sedangkan dasar-dasar politik luar negeri RRC akan dideskripsikan dengan banyaknya perubahan pandangan RRC dan paradigma yang terjadi dalam tata hubungan internasional. Sistem ekonomi menjelaskan bagaimana RRC mulai membuka hubungan dengan negara-negara tetangganya, terutama Myanmar setelah dilakukannya reformasi oleh Deng Xioping. Sistem pertahanan akan mendeskripsikan mengenai pandangan pertahanan RRC yang disesuaikan dengan kondisi internasional

Bab III akan mendeskripsikan tentang kebijakan Pemerintah RRC terhadap pelanggaran demokrasi dan HAM di Myanmar. Pada Bab III ini juga akan dijelaskan tindakan represif Junta Myanmar terhadap suku-suku minoritas di Myanmar, kehidupan rakyat Myanmar yang miskin serta bagaimana kondisi demokrasi di Myanmar.

Bab IV akan mendeskripsikan tentang kepentingan Pemerintah RRC terhadap Myanmar, terutama di bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya berbagai investasi dan kerjasama ekonomi antara RRC-Myanmar. Sedangkan dalam bidang keamanan militer, akan dijelaskan mengenai kerjasama militer RRC-Myanmar untuk menjaga stabilitas domestik RRC melalui wilayah perbatasan, mengontrol perdagangan internasionalnya dan mengawasi pergerakan militer di sekitar perairan Myanmar, seperti Teluk Benggala, Samudra Hindia, Selat Malaka dan Laut Andaman.

Bab V merupakan kesimpulan